

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, mempunyai penduduk yang cukup besar. Pada tahun 2017, Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) mencatat jumlah penduduk Indonesia berjumlah hampir 270 juta jiwa (264,7 juta) di mana jumlah tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara nomor 4 dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Dengan kondisi seperti itu, Indonesia harus mampu mencukupi segala kebutuhan yang di perlukan untuk bernegara yang mencakup aspek ekonomi, hukum, pangan, dan aspek lainnya.

Pangan adalah salah satu aspek yang harus dipenuhi negara jika ingin mempertahankan eksistensi dan terhindar dari krisis. Kondisi pangan yang stabil akan menciptakan kondisi negara yang baik sehingga negara tersebut dapat mengembangkan aspek – aspek lain dalam bernegara. Indonesia dalam hal ini mempunyai ketahanan pangan yang cukup dinamis setiap tahunnya. Berdasarkan data BPS, dengan luas wilayah 1,9 juta km persegi, Indonesia mempunyai total luas wilayah pertanian kurang dari 8 juta hektar (7,74 juta) di mana luas wilayah tersebut akan berdampak kepada hasil pertanian Indonesia (CNN, 2018).

Menurut data BPS dan juga Kementerian Pertanian, pada tahun 2017 Indonesia menghasilkan 81 juta ton padi yang di dapat dari seluruh provinsi Indonesia dengan total pertumbuhan dari tahun 2013 – 2017 sejumlah 2,56%. Setiap tahunnya, data tersebut menunjukkan grafik bahwa hasil pertanian Indonesia pada sektor padi mengalami tren positif di mana terdapat kenaikan tiap tahunnya.

Pangan Indonesia telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Pangan di mana semua pasal yang di muat berisi tentang ketentuan pangan Indonesia. Ketentuan yang ada dalam UU tersebut mencakup seluruh kegiatan pangan yang ada di Indonesia, termasuk di dalamnya terdapat ketentuan ekspor impor Pangan Indonesia (Bab 1 Pasal 1 Ayat 24 – 25). Ekspor Impor adalah salah satu bentuk interaksi antar negara di dunia di mana tiap-tiap negara menjalankan kegiatan jual beli. Indonesia yang tergabung dalam *World Trade Organization* (WTO), otomatis akan menjalankan kegiatan ekspor impor sebagai cita-cita WTO dan seluruh anggota nya untuk menciptakan liberalisasi perdagangan dunia. Liberalisasi perdagangan adalah sebuah kondisi di mana seluruh negara dunia dapat

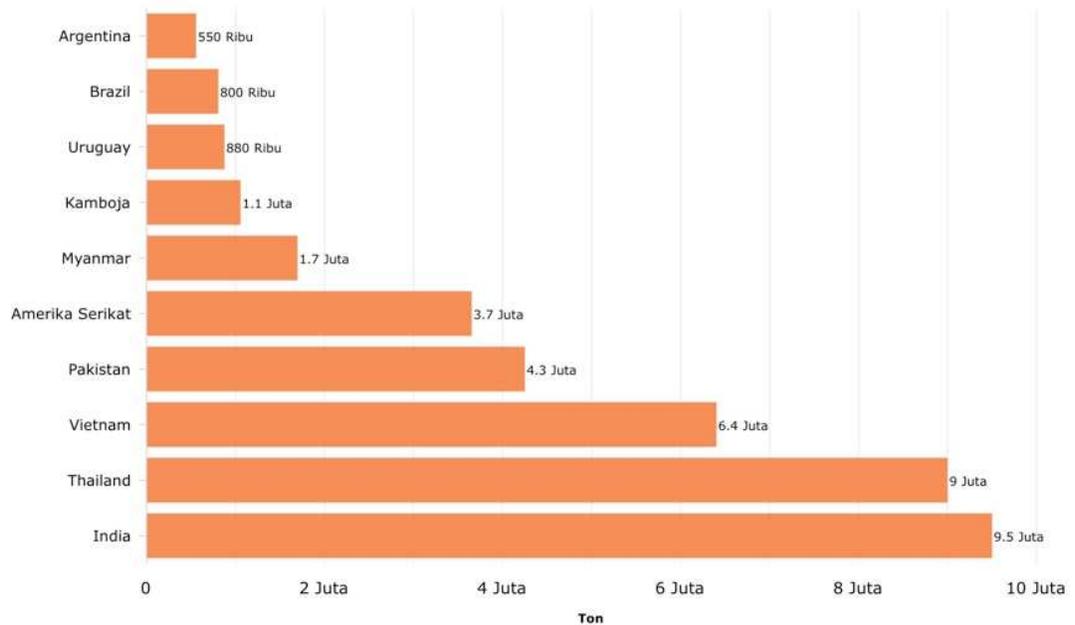
melakukan kegiatan ekonomi tanpa adanya hambatan seperti pajak, kuota, dan lainnya seperti yang coba di terapkan Indonesia sesuai dengan prinsip WTO yang tertuang dalam UU nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal di mana UU tersebut telah mengimplementasikan prinsip WTO yang ingin mewujudkan liberalisasi perdagangan yaitu *Most-Favoured-Nation* dalam Pasal 1 ayat 1 ,dan Pasal 6 ayat 1, *Prinsip National Treatment* dalam Pasal 6 ayat 1, Prinsip Larangan Restriksi Kuantitatif dapat ditemukan dalam Pasal 8, Prinsip Perlindungan melalui Tarif yang ditemukan secara tersirat pada asas efisiensi berkeadilan dalam Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 14, Prinsip Resiprositas dapat ditemukan dalam Pasal 7 dan Pasal 32, dan Prinsip Perlakuan Khusus bagi Negara Berkembang diatur dalam Pasal 13.

Dalam konteks pertanian, WTO mempunyai sebuah perjanjian yang dinamakan “*Agreement on Agriculture*” dimana perjanjian tersebut memiliki 3 pilar yaitu akses pasar, dukungan domestik, dan kompetisi ekspor (WTO, *The Uruguay Round reform programme for trade in agriculture* , 2018). Inti pilar tersebut adalah untuk menghapuskan semua hambatan dalam aspek perdagangan pada sektor pertanian, sehingga nantinya seluruh negara yang tergabung dalam anggota WTO mampu mempunyai ketahanan pangan yang stabil dimana hal tersebut merupakan implementasi dari kegiatan perdagangan pada sektor pertanian.

Indonesia sebagai negara agraria yang cukup besar (7,75 juta hektar luas sawah, data BPS 2017), mempunyai potensi yang besar untuk dapat memanfaatkan keanggotaannya dalam WTO, dan juga perjanjian *Agreement on Agriculture (AOA)* yang merupakan salah satu agenda WTO dengan meningkatkan kegiatan ekspor pertaniannya (Agreement, 2018). Data yang dihimpun BPS mengenai ekspor beras Indonesia mencatat bahwa dalam kurun waktu 4 tahun pada 2014 sampai 2018 mengalami peningkatan yang cukup pesat, di mana jika pada tahun 2014 Indonesia berhasil mengekspor 81 ton beras, namun pada 2018 Indonesia mampu mengekspor lebih dari 3.300 ton beras.

Beras adalah salah satu kebutuhan pangan terbesar di dunia, mengingat beras adalah kebutuhan pokok makanan, terutama bagi negara – negara di Asia. Perputaran kegiatan perdagangan beras tiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dunia.

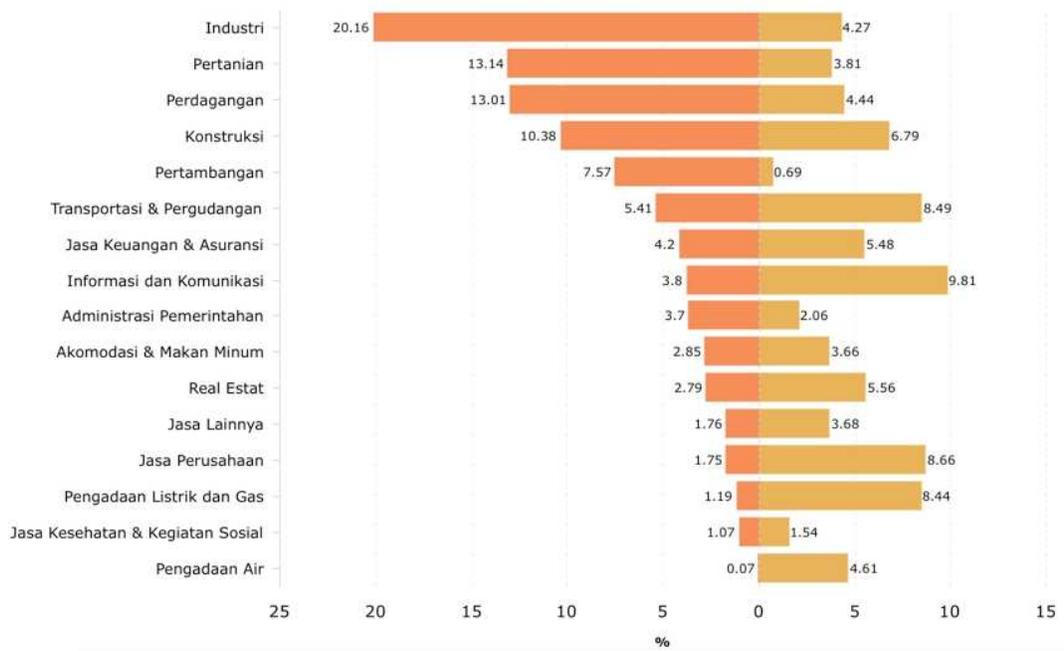
Grafik 1: 10 Negara Pengekspor Beras Terbesar Dunia 2016



Sumber : Katadata, 2018

Pada tahun 2016, 10 negara pengekspor beras terbesar di dunia mampu memasok lebih dari 35 juta ton beras ke seluruh dunia lewat kegiatan ekspor, dimana hal ini menunjukkan eksistensi beras sebagai komoditas penting dalam pangan dunia.

Melihat kondisi seperti ini, Indonesia seharusnya memanfaatkan seluruh ‘modal’ yang dipunyai untuk mampu menjadi salah satu pemasok beras terbesar di dunia. Kondisi agraria, dalam hal ini adalah luas sawah Indonesia yang mumpuni, ditambah dengan keanggotaan Indonesia dalam WTO dimana ada *Agreement on Agriculture* didalamnya seharusnya bisa dimanfaatkan Indonesia untuk meningkatkan sektor pertanian pada bidang beras.

Grafik 2 : Kontribusi dan Pertumbuhan Sektoral PDB Indonesia (2017)

Sumber : Katadata, 2018

Pertanian menjadi salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun ke tahun, terbukti pada tahun 2017 sektor pertanian mampu menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi kedua bagi Indonesia (Perindustrian, 2018). Dengan kondisi tersebut harusnya Indonesia dapat mengembangkan sektor pertaniannya lebih masif untuk meningkatkan pertumbuhannya, terlebih Indonesia menargetkan sebagai 10 negara ekonomi terbesar pada tahun 2030 nanti. Menurut BPS, salah satu faktor mengapa ekspor beras Indonesia mengalami peningkatan adalah karena beras Indonesia mempunyai ciri khas, yaitu tidak mengandung bahan kimia dalam proses pembuatannya, mempunyai unsur glikemik yang rendah, dan mempunyai ciri khas rasa yang berbeda dengan beras produksi Thailand maupun Vietnam sebagai saingan Indonesia di ASEAN. BPS juga memaparkan bahwa negara yang meminati beras Indonesia rata-rata berasal dari Eropa, yaitu Italia, Jerman, dan Belgia, serta ada dari Australia dan Amerika. Kondisi ini seharusnya menjadi kesempatan Indonesia untuk dapat memenuhi kebutuhan beras dunia, dengan keunggulan kualitas beras Indonesia yang mempunyai ciri khas dan sudah diminati beberapa negara, terlebih Indonesia mempunyai akses ekspor ke negara-negara WTO mengingat Indonesia merupakan anggota WTO.

Peningkatan ekspor beras Indonesia akan menghasilkan manfaat yaitu Indonesia mampu mengeksport berasnya ke Belgia, Italia, dan Jerman, dimana hal tersebut dapat membuka akses pasar Uni Eropa. Indonesia dapat menjadikan ekspor beras ini sebagai alat ‘diplomasi’ untuk mengekspansi pasar Uni Eropa dengan menjadi Belgia, Italia, dan Jerman sebagai jembatannya, dimana ketika Indonesia mampu melakukan hal tersebut, Indonesia akan mendapat peluang untuk menarik investasi dari Uni Eropa untuk mengembangkan infrastruktur pertanian Indonesia sebagai langkah untuk meningkatkan produksi beras.

1.2 Permasalahan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis bertujuan untuk menganalisa bagaimana potensi Indonesia dalam memanfaatkan kondisi agraria yang ada, dengan keikutsertaan Indonesia dalam WTO dimana terdapat perjanjian AOA dengan 3 pilarnya untuk meningkatkan kegiatan ekspor pada sektor berasnya.

Kondisi domestik Indonesia yang cukup dinamis menjadi hambatan bagi Indonesia untuk dapat memanfaatkan kondisi tersebut. Pemerintah dalam hal ini harus mampu menjaga kondisi domestik, sekaligus memanfaatkan kondisi Indonesia dari sektor agraria dan keikutsertaannya dalam WTO. Pemerintah bisa melakukan itu dengan pengimplementasian kebijakan ekspor yang benar, kebijakan pangan domestik yang mendukung para pelaku kegiatan pertanian Indonesia, dan harus mampu melindungi Indonesia dari kegiatan impor yang berlebihan dimana hal tersebut tentunya akan membuat persaingan ekonomi sektor pangan nasional yang semakin berat.

Oleh karena itu, pertanyaan penelitian yang akan dijawab melalui skripsi ini adalah

- **Bagaimana bentuk pemanfaatan keanggotaan WTO dalam peningkatan ekspor beras Indonesia kurun waktu 2014-2018?**

1.3 Tujuan Penelitian

- Melihat dinamika kebijakan pangan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia.
- Menganalisa potensi produk pertanian Indonesia.
- Mengidentifikasi hambatan Indonesia untuk mengeksport produk pertanian.
- Menjelaskan implementasi perjanjian AOA di Indonesia.
- Melihat manfaat peningkatan ekspor beras bagi Indonesia.

1.4 Signifikansi

Secara teori, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah tentang bagaimana pemanfaatan keanggotaan Indonesia di WTO, dalam peningkatan ekspor beras pada tahun 2014 – 2018, dimana penelitian ini akan fokus dalam menganalisa dinamika sektor pertanian Indonesia, khususnya dalam hal beras, serta bagaimana Indonesia mampu memaksimalkan *Agreement on Agriculture* di WTO terhadap peningkatan ekspor beras yang terjadi pada 2014 – 2018.

Secara praktis, diharapkan riset ini dapat menjadi referensi bagi para peneliti maupun mahasiswa hubungan internasional dalam mempelajari tentang manfaat Indonesia berada di WTO dalam peningkatan ekspor beras pada tahun 2014 – 2018.

1.5 Tinjauan Pustaka

Pada literatur yang berjudul “*The Principles of Political Economy and Taxation*” (Richardo, 2001) dijelaskan bahwa perdagangan internasional bisa terjadi jika ada perbedaan keunggulan komparatif yang terjadi pada setiap negara. Keunggulan komparatif yang dimaksud adalah ketika sebuah negara mampu menghasilkan produksi sebuah komoditas dengan biaya produksi yang murah, seperti misalkan dalam studi kasus Indonesia dengan Thailand dalam hal kopi dan karet. Indonesia mampu memproduksi kopi dengan banyak dan biaya murah sedangkan tidak mampu menghasilkan karet dengan maksimal, sebaliknya Thailand mampu memproduksi karet dengan banyak dan biaya murah sedangkan tidak mampu menghasilkan kopi dengan maksimal. Kasus tersebut akan menciptakan kondisi dimana Indonesia yang membutuhkan karet dan Thailand yang membutuhkan kopi akan melakukan perdagangan dan menghasilkan keuntungan bagi masing – masing negara.

Pada literatur kedua yang berjudul “*Neoliberalisme : Antara Mitos dan Harapan*” (Soesilowati, 2009), dijelaskan bahwa neoliberalisme menciptakan sebuah kondisi “*Less Government*” dimana peran pemerintah harus dikurangi dan negara yang ingin maju harus berorientasi pada aksi rakyat. Dengan rakyat yang menjadi penggerak ekonomi negara, literature ini menjelaskan bahwa sebuah negara akan maju karena kebutuhan rakyat dipenuhi oleh rakyat. Literatur ini juga menjelaskan bahwa fungsi pemerintah dalam neoliberalisme adalah untuk mengeluarkan kebijakan pro rakyat dan pro ekonomi, dimana hal tersebut sebagai bentuk fungsi pemerintah, sekaligus bentuk sinergitas antara pemerintah dan rakyat. Literatur ini akan menjadi acuan penulis untuk menjelaskan kerangka pemikiran penulis yang memakai perspektif

neoliberalisme untuk menjelaskan peran pemerintah dalam mendukung sektor pertanian Indonesia.

Pada literatur ketiga yang berjudul “Liberalisasi Perdagangan : Sisi Teori, Dampak Empiris, Dan Perspektif Ketahanan Pangan” (Gatoet S. Hardono, 2004) menjelaskan bahwa liberalisasi perdagangan seperti dua mata pisau, dimana mempunyai manfaat dan sekaligus akibat. Manfaat liberalisasi perdagangan tentunya akan meningkatkan ekonomi sebuah negara, meskipun hal tersebut masih bisa diperdebatkan, namun akibat yang didapat dari liberalisasi perdagangan adalah semakin terancamnya pasar domestic terutama hal ini akan sangat berdampak bagi negara berkembang yang tentunya akan mendapat ‘serangan’ produk dari luar. Literatur ini akan menjadi acuan penulis untuk membahas bagaimana pengaruh impor Indonesia bagi para pelaku ekonomi dalam sektor pertanian.

Pada literatur keempat yang berjudul “Ketahanan Pangan” (Suharyanto, 2011) dijelaskan bahwa pengimplementasian UU Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 perlu segera dilakukan. Hal tersebut akan berdampak kepada kepemilikan lahan pertanian bagi para petani sehingga petani dapat menghasilkan produksi pertanian yang lebih besar lagi. Literatur ini juga mengkritik pemerintah Indonesia tentang bagaimana distribusi pangan Indonesia yang tidak merata, sehingga hal tersebut bisa memunculkan komplikasi ‘bernegara’ seperti masalah ekonomi, sosial, budaya, dan aspek lainnya. Literatur ini akan menjadi acuan penulis untuk menganalisa upaya pemerintah dalam mendukung produksi pertanian Indonesia.

Pada literatur kelima yang berjudul “*Agreement On Agriculture Dalam World Trade Organization*” (Putra, 2016), dijelaskan bahwa AOA merupakan salah satu upaya WTO dalam menciptakan liberalisasi perdagangan pada sektor pertanian yang lebih mudah di dunia. AOA dengan setiap pilarnya memungkinkan perdagangan pada sektor pertanian dapat menjadi aktivitas yang massif sehingga output yang didapatkan dari kegiatan tersebut adalah terpenuhinya seluruh kebutuhan pangan dunia. Literatur ini akan menjadi acuan penulis untuk mengidentifikasi bagaimana dinamika serta ketentuan yang ada dalam AOA.

Pada literatur keenam yang berjudul “*The World Trade Organization Agreement on Agriculture and World Food Security*” (Blandford, 2015), dijelaskan bahwa AOA merupakan wujud dari keinginan dunia untuk menciptakan ketahanan pangan dalam jangka Panjang. Literatur ini membahas tentang bagaimana perang dagang yang

terjadi antara Amerika Serikat (AS) dan Eropa dapat memberikan dampak yang negatif bagi sektor pangan dunia. Merujuk kondisi tersebut, perlu adanya sebuah wadah internasional yang mengatur stabilitas pangan dunia, dimana implementasi dari cita-cita tersebut adalah terbentuknya AOA. Literatur ini akan menjadi acuan penulis untuk menganalisa bagaimana AOA dapat menjadi alat untuk menjaga stabilitas pangan dunia.

Pada literatur ketujuh yang berjudul “Menuju Ketahanan Pangan Indonesia Berkelanjutan 2025: Tantangan Dan Penanganannya” (Suryana, 2014), dijelaskan bahwa ketahanan pangan adalah modal penting bagi setiap negara untuk menghindari segala krisis. Dalam literatur ini juga dijelaskan bagaimana ketahanan pangan mendapat beberapa ancaman, seperti pergerakan permintaan dan penawaran yang berlawanan, serta krisis pangan global yang dialami dunia saat ini, dimana kondisi tersebut akan mengancam ketahanan pangan. Literatur ini juga memberi masukan terhadap dukungan untuk ketahanan pangan diantaranya dengan melakukan investasi yang massif terhadap sektor pangan. Literatur ini akan menjadi acuan penulis untuk menjelaskan kerangka pemikiran penulis yang memakai konsep *Food Security* untuk menjelaskan potensi pangan Indonesia.

Pada literatur kedelapan yang berjudul “Ketahanan Pangan Indonesia Dalam Ancaman: Strategi dan Kebijakan Pemantapan dan Pengembangan” (Fagi, 2014), menjelaskan bahwa pemerintah mempunyai peranan yang vital dalam pembangunan pertanian sebuah negara. Pemerintah harus mampu mempunyai program – program yang mendukung jalannya kegiatan pertanian di negaranya seperti dengan membuat kebijakan pro petani, subsidi pupuk, pinjaman modal, dan berbagai program lain yang memudahkan untuk mengembangkan sektor pertanian negara. Literatur ini akan menjadi acuan penulis untuk menjelaskan peranan pemerintah Indonesia dalam mengembangkan potensi pangan Indonesia dalam hal ketahanan pangan, dan juga potensi sebagai salah satu negara pengekspor terbesar dalam sektor pertanian.

Pada literatur kesembilan yang berjudul “Relasi Kekuasaan *World Trade Organization* Dalam Kebijakan Pangan Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla” (Hakim, 2016), dijelaskan bahwa kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Presiden Republik Indonesia (RI) membawa beberapa catatan yang cenderung negative dalam sektor pertanian. Literatur ini menganalisa bahwa arah liberalisasi perdagangan SBY dalam sektor pertanian membawa dampak yang buruk bagi pelaku sektor pertanian di Indonesia. Pengimplementasian AOA di

Indonesia pada zaman SBY juga mengalami kondisi yang dinamis, dimana banyak hambatan yang terjadi. AOA yang menerapkan prinsip pengurangan subsidi dari pemerintah dinilai membuat memberatkan petani Indonesia karena akan berdampak pada kurangnya modal petani Indonesia dalam melakukan kegiatan pertanian. Literatur ini akan menjadi acuan penulis untuk menganalisa implementasi AOA di Indonesia

Pada literatur kesepuluh yang berjudul “Analisis Produksi Beras Di Indonesia” (Sanny, 2010) dijelaskan bahwa pemanfaatan lahan padi pada Indonesia perlu dilakukan dengan peningkatan kualitas produksi, serta memaksimalkan proteksi terhadap gangguan terhadap produk pertanian seperti hama, dan kondisi alam. Lahan pertanian Indonesia yang cukup luas harus juga diiringi dengan produktivitas yang tinggi sebagai upaya untuk menciptakan ketahanan pangan Indonesia yang stabil. Literatur ini juga menganalisa bagaimana peran teknologi pada sektor pertanian mampu meningkatkan produktivitas pertanian Indonesia. Literature ini akan menjadi acuan penulis untuk menganalisa hambatan sektor pertanian Indonesia dalam memproduksi produk pertanian.

Pada literatur terakhir yang berjudul “Pengaruh Ekspor Dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia” (Ismadiyanti Purwaning Astuti, 2018) dijelaskan bahwa kegiatan ekspor impor mempunyai dampak bagi setiap negara yang melakukannya. Literatur ini menjelaskan bahwa ekspor akan meningkatkan ekonomi sebuah negara karena hal tersebut sesuai dengan teori perdagangan internasional. Literatur ini juga menjelaskan bahwa kegiatan ekspor impor adalah salah satu faktor penggerak roda perekonomian negara yang cukup berkontribusi, selama kegiatan ekspor maupun impornya tidak mengalami ketimpangan, karena jika terjadi ketimpangan, maka akan menimbulkan beberapa hal yang negative, terutama jika kegiatan impor jauh lebih masif dari kegiatan ekspor. Literatur ini akan menjadi acuan penulis untuk menganalisa bagaimana dinamika kegiatan ekspor impor Indonesia, terutama dalam bidang pertanian.

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan perspektif neoliberalisme untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ada. Neoliberalisme adalah perspektif yang dikembangkan dari perspektif liberalisme dimana lebih memfokuskan substansi

kepada ekonomi liberal. Neoliberalisme hadir setelah kegagalan liberalisme yang terjadi di dunia. Gagasan – gagasan neoliberalisme banyak diadopsi oleh organisasi ekonomi internasional untuk menjadi rujukan pembuatan perjanjian, peraturan dan juga ketentuan. John Williamson pada 1993 berhasil menyatukan gagasan tentang neoliberalisme dalam *Washington Consensus* dimana ada 12 kebijakan yang sesuai dengan gagasan neoliberalisme. Inti dari perspektif ini adalah untuk menciptakan pasar perdagangan bebas, atau yang biasa disebut liberalisasi perdagangan dunia. Neoliberalisme mempunyai tiga prinsip untuk menciptakan liberalisasi perdagangan tersebut, yaitu Privatisasi, Deregulasi, dan Free Trade.

Privatisasi dalam hal ini adalah pemberian hak, kekuasaan, dan wewenang terhadap rakyat untuk dapat melakukan usaha dan menjadi pelaku ekonomi tanpa ada batasan, sehingga individu tersebut dapat mengembangkan usahanya sebebannya. Deregulasi adalah bentuk “*Less Government*” dimana dalam hal ini adalah adanya modifikasi peran pemerintah dalam sektor ekonomi negaranya yaitu tidak melakukan intervensi terhadap kegiatan ekonomi yang terjadi di negaranya (Williamson, 2004)

Neoliberal menitikberatkan ekonomi kepada rakyat sebagai pelaku ekonomi negara, serta melakukan degradasi terhadap peran pemerintah pada sektor ekonomi sebagai wujud liberalisasi ekonomi. Perspektif ini akan menjadi acuan penulis untuk menganalisa sinergi Pemerintah Indonesia dengan rakyat Indonesia untuk memanfaatkan potensi agraria Indonesia, dan keanggotaan Indonesia dalam WTO untuk menjadi salah satu negara pengespor sektor pertanian terbesar di dunia.

Selain perspektif neoliberalisme, penulis juga akan memakai teori *food security*. Teori *food security* atau ketahanan pangan adalah teori dimana rumah tangga mempunyai akses yang cukup untuk pangan. Akses pangan tersebut juga terbagi kedalam dua unsur, yaitu akses pangan secara ekonomi, dalam hal ini adalah ekonomi rumah tangga tersebut, dan akses pangan secara ketersediaan, dalam hal ini adalah bentuk fisik dari pangan tersebut. Kedua unsur tersebut haruslah sejalan tanpa mengurangi kontribusi salah satu unsur (International Food Policy Institute). IFPRI mengatakan bahwa dunia harus mampu menghasilkan produk pangan pada harga yang mampu dijangkau oleh semua kalangan yang ada di negara tersebut, sekaligus tidak merusak lingkungan sekitar (Rindayati, 2015)

Teori *food security* akan menjadi acuan penulis untuk menganalisa bagaimana ketahanan pangan Indonesia dalam melakukan dua hal. Pertama, ketahanan pangan

Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pangan Nasional, dan kedua, untuk melakukan kegiatan ekspor pada sektor pertanian.

1.7 Preposisi

Dalam menjawab pertanyaan penelitian yang telah dijelaskan, penulis merumuskan jawaban sementara bahwa Indonesia mampu memanfaatkan keanggotaannya dalam WTO dan AOA terhadap peningkatan ekspor beras Indonesia dengan kebijakan ketahanan pangan Indonesia yang diatur dalam UU Nomor 7 tahun 1996 tentang ketahanan pangan, serta UU Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Indonesia juga mampu memanfaatkan kebijakan *green box* AOA dengan maksimal dimana ada program pemerintah yang dibuat untuk mendukung kegiatan pertanian di Indonesia seperti pembangunan infrastruktur pertanian dan pelatihan terhadap petani.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis metode kualitatif dengan jenis konten analisis untuk menjelaskan analisa keikutsertaan Indonesia di WTO dalam peningkatan ekspor beras tahun 2014 – 2018. Penelitian diklasifikasikan sebagai penelitian kualitatif jika arah penelitian ini menggambarkan suatu situasi, fenomena, atau peristiwa yang terjadi (Kumar, 2011)

1.8.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan melakukan studi literatur sebagai landasan awal dalam membuat asumsi penelitian. Pada pengumpulannya, penelitian ini menggunakan data primer yaitu dari website resmi *World Trade Organization* (WTO), Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, dan Undang-Undang Indonesia. Sementara untuk data sekunder diperoleh dari berita tentang keikutsertaan Indonesia di WTO dalam peningkatan ekspor beras tahun 2014-2018 yang menjadi buku, jurnal, berita, artikel, dan dokumen lain yang berkaitan dengan topik penelitian. (Kumar R. , 2011).

Pengumpulan data tersebut akan penulis pakai sebagai indikator untuk menganalisis keikutsertaan Indonesia di WTO dalam peningkatan ekspor beras tahun 2014-2018.

1.8.3 Tipe Penelitian

Penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis yang merupakan tipe penelitian yang mengumpulkan data, merekap serta menganalisa melalui penjelasan yang sejelas-jelasnya sehingga dapat menggambarkan situasi, masalah, fenomena atau program secara sistematis (Kumar R. , 2011)

1.9 Pembabakan

Bab 1 **Pendahuluan** : Pada bab ini berisikan pemaparan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, signifikansi/kontribusi penelitian, studi literatur, kerangka pemikiran, preposisi, metode penelitian, serta pembabakan.

Bab 2 **Gambaran Umum Produksi Beras Nasional dan Keanggotaan Indonesia di WTO** : Dibagian ini terdapat pembahasan dan uraian mengenai bagaimana produksi beras nasional meliputi visi pemerintah Indonesia, serta keanggotaan WTO dan AOA sekaligus perubahan kebijakan nasional sejak keanggotaan Indonesia dalam WTO.

Bab 3 **Analisis Keikutsertaan Indonesia di WTO Dalam Peningkatan Ekspor Beras Tahun 2014-2018 berdasarkan Teori Neoliberalisme dan *Food Security*** : Di bab ini, penelitian ini akan menggunakan teori neoliberalisme dan *food security* untuk menganalisis bagaimana Keikutsertaan Indonesia di WTO mampu meningkatkan ekspor beras pada tahun 2014-2018.

Bab 4 **Penutup** : Pada bab ini berisikan hasil dan kesimpulan dari penelitian serta saran dan rekomendasi bagi penelitian selanjutnya.